

RANCANGAN SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 55 TAHUN 2008

DESY DETRIANA
NIM 1022500361

Sistem Informasi STMIK ATMALUHUR PANGKALPINANG
Jl. Raya Sudirman Selindung Lama Pangkalpinang Kepulauan Babel
E-mail: d2triana@yahoo.co.id

ABSTRAKS

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung is implementing agencies and local community economic development through the empowerment of the people and all the economic power, either through small scale industries, medium and large. Industrial development focused on regional manufacturing commodities that are more advanced and globally competitive.

The financial administration of the region is an integral part of the financial management area, according to both the Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya and Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah and then refined with the publication of Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007. The financial administration areas include general principles of financial administration, implementation of regional financial administration, revenue administration, expenditure and administration of funding and administration tasks.

The process of drafting the administration and accountability report treasurer of the expenses incurred at the Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung until now still manual. Therefore, frequent mistakes in carrying out the processes of data processing. Among the common mistakes in making Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), delay the transaction or transactions that were deemed too long, and the absence of a computerized system that makes the process of calculating the transaction to be slow, ineffective and inefficient.

To overcome these problems, we need a computerized system and preparation of expenditure accountability report treasurer highly suited to support service to the community. So it can solve the problems or constraints on systems running today. By leveraging this proposed computerized system is good and right, the possibility of supervision or control over sales order processing easier.

Kata Kunci :

DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), SPD (Surat Penyediaan Dana), SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum, struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007. Penatausahaan keuangan daerah mencakup asas umum penatausahaan keuangan, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran serta penatausahaan pendanaan dan tugas pembantuan.

Lingkup penatausahaan pengeluaran diantaranya Penyediaan Dana (SPD), Permintaan Pembayaran (SPP) baik SPP-UP (Uang Persediaan), SPP-GU (Ganti Uang), SPP-TU (Tambahan Uang) maupun SPP-LS (Langsung) baik SPP-LS Gaji dan Tunjangan dan SPP-LS Barang dan Jasa serta

Perintah Membayar (SPM) baik SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU maupun SPM-LS Gaji dan tunjangan dan SPM-LS Barang dan Jasa, Pencairan Dana (SP2D) serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

Penatausahaan keuangan khususnya prosedur pengajuan dana dan pembuatan laporan yang dilakukan bendahara pengeluaran pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai saat ini masih dilakukan secara manual, yaitu untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) hanya menggunakan microsoft excel. Permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam pengetikan kode-kode program dan penentuan pagu anggaran dari suatu kegiatan dalam proses pengajuan dana menyebabkan ini perlu diperbaiki kembali, juga kurangnya kontrol penggunaan anggaran sehingga penyerapan anggaran tidak dapat diukur.

Penggunaan sistem informasi diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan pengelolaan keuangan sehingga semua tahapan kegiatan dapat diterjemahkan ke dalam aplikasi secara terintegrasi dengan baik, penulis merasa perlu membuat suatu rancangan sistem informasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 yang berorientasi Obyek dengan *Unified Modelling Language (UML)*. Karena *UML* menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan *UML*, kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun.

1.2 Batasan Masalah

Untuk menjaga agar tidak berkembang masalah dan keterbatasan waktu yang ada maka penulisan ini hanya dibatasi dalam masalah perancangan analisa sistem informasi penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran mengenai pengajuan dana belanja langsung untuk uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada ruang lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampainnya. Dalam penulisan ini tidak membahas masalah penatausahaan dan pertanggungjawaban mengenai penggunaan anggaran yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah dalam suatu sistem yang terintegrasi sehingga keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen atau prosedur-prosedur yang terintegrasi menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam mencapai suatu tujuan. [Jogiyanto : 2003]

2.2 Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi Obyek dengan *UML*

Analisa sistem adalah proses menentukan kebutuhan sistem, apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan klien, bukanlah bagaimana sistem tersebut diimplementasikan. [Sutopo : 2002]

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. [Sutopo : 2002]

UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan *UML*, kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun.

2.2.1 Activity Diagram

Activity diagram adalah teknik untuk mendiskripsikan logika prosedural, proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. [Sutopo : 2002]

2.2.2 Analisa Dokumen Keluaran

Analisa dokumen keluaran adalah analisa mengenai dokumen-dokumen keluaran yang dihasilkan dari sebuah sistem.

2.2.3 Analisa Dokumen Masukan

Analisa masukan adalah bagian dari pengumpulan informasi tentang sistem yang sedang berjalan. [Sutopo : 2002]

2.2.4 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan sebuah fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. [Sutopo : 2002]

Yang ditekankan dalam sebuah *use case diagram* adalah “apa” yang diperbuat sistem dan bukan “bagaimana” sistem itu melakukannya. Sebuah *use case* merepresentasikan sebuah interaksi antara *actor* dengan sistem.

2.2.5 Deskripsi Use Case

Deskripsi *use case* adalah resume langkah atau tahapan dalam *use case*. [Sutopo : 2002]

Kegunaannya untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai *use case diagram*.

2.2.6 Entity Relationship Diagram (ERD)

Diagram-ER adalah pemodelan data utama dan akan membantu mengorganisasikan data dalam suatu proyek ke dalam entitas-entitas dan menentukan hubungan antar entitas. [Kristanto : 2003]

Cardinality adalah tingkat hubungan atau derajat relasi. Tingkat *cardinality* yang terjadi pada sebuah *ERD* adalah sebagai berikut :

1) One To One (1 :1)

Hubungan relasi *one to one* yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B.

2) One To Many (1 : M)

Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi setiap entitas pada entitas B dapat berhubungan dengan satu entitas pada himpunan entitas A.

3) Many To One (M : 1)

Setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A, tetapi setiap entitas pada entitas A dapat berhubungan dengan satu entitas pada himpunan entitas B.

4) Many To Many (M : M)

Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, begitu juga sebaliknya.

2.2.7 Logical Record Structure (LRS)

Diagram-ER (ERD) harus dikonversi ke bentuk *structure (struktur record)* secara logik). Sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah *Diagram-ER* akan mengikuti pola/aturan pemodelan tertentu.

2.2.8 Tabel

Tabel adalah koleksi obyek yang terdiri dari sekumpulan elemen yang diorganisasikan secara kontigu, artinya memori yang dialokasikan antara satu elemen dengan elemen lainnya mempunyai adress yang berurutan. [Kristanto : 2003]

2.2.9 Spesifikasi Basis Data

Basis data merupakan sekumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan tersimpan di luar komputer serta digunakan perangkat lunak (*software*) tertentu untuk memanipulasinya. [Fathansyah : 2003]

2.2.10 Rancangan Dokumen Keluaran

Rancangan keluaran merupakan informasi yang akan dihasilkan dari keluaran sistem yang dirancang. [Kristanto : 2003]

2.2.11 Rancangan Dokumen Masukan

Rancangan masukan merupakan data yang dibutuhkan untuk menjadi masukan sistem yang dirancang. [Kristanto : 2003]

2.2.12 Rancangan Layar Program

Rancangan layar program merupakan bentuk tampilan sistem layar komputer sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan dari sistem yang dirancang. [Kristanto : 2003]

2.2.13 Sequence Diagram

Sequence diagram adalah *visual coding* (perancangan *form/layar*). Interaksi obyek yang tersusun dalam urutan waktu/kejadian. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan *use case diagram*, memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam *use case*.

2.2.14 Class Diagram

Class diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Hal ini disebabkan karena *class* adalah deskripsi kelompok obyek-obyek dengan properti, perilaku (operasi) dan relasi yang sama. Disamping itu *class diagram* bisa memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut mencerminkan dari class-class yang ada, yang relasinya satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya *class diagram* menjadi diagram paling populer di *UML*.

2.3 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam proses pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran yaitu sebagai berikut :

- a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- b) Surat Penyediaan Dana (SPD)
Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- d) Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Dokumen ini dibuat oleh PPK-SKPD berdasarkan SPP yang telah dibuat oleh

Bendahara Pengeluaran. SPM diotorisasi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM, dengan ketentuan satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM dan diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari sejak SPM diterima. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima SPM.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka penulisan ini, penulis melakukan pengumpulan bahan yang diperlukan untuk menganalisa dari sistem yang sedang berjalan. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Study Laporan

1) Observasi

Dengan melakukan pengamatan langsung dan meninjau langsung terhadap pelaksanaan proses penatausahaan keuangan daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2) Wawancara

Melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan alur permasalahan, wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan penulisan yang mungkin lepas dari pengamatan.

b) Study Kepustakaan

Selain kegiatan observasi dan wawancara dalam pengumpulan data, penulis juga mencari data dan informasi dari perpustakaan dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan tugas akhir ini.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Dalam kesempatan ini penulis menentukan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penulis.

4.2 Obyek Penelitian

Adalah suatu data yang menjadi sasaran penelitian yang dapat dijadikan sebagai suatu informasi untuk penelitian ini.

4.3 Instrumentasi

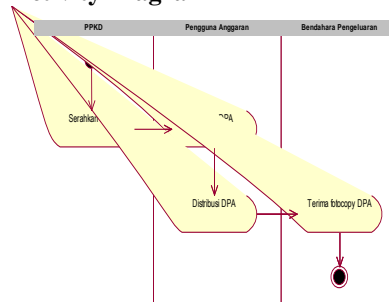
Merupakan alat bantu yang digunakan dalam melakukan penelitian dalam hal ini peneliti menggunakan informasi masukan dan keluaran dalam suatu sistem sebagai bahan dalam mengumpulkan data.

4.4 Teknik Analisis Data

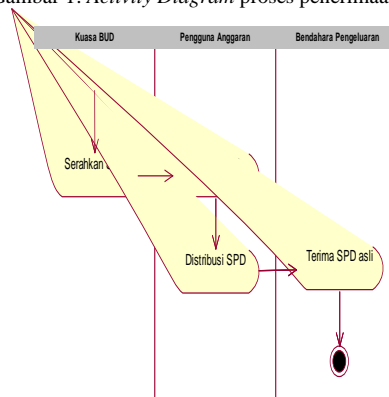
Konsep dasar berorientasi obyek mmencapai kematangannya pada saat masalah analisis dan desain menjadi lebih diperhatikan dari pada masalah coding. Secara spesifik, salah seorang penulis mengungkapkan bahwa pengertian “berorientasi obyek” berarti bahwa kita mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan dari obyek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. [Sutopo : 2002]

4.5 Analisa Proses Pengajuan Uang Persediaan

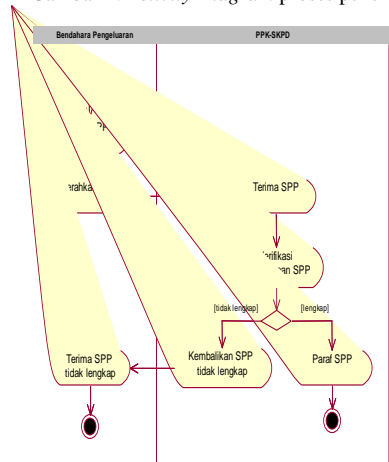
4.5.1 Activity Diagram



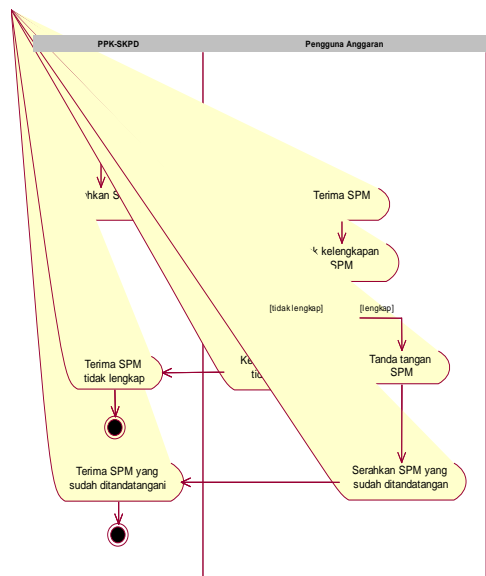
Gambar 1: Activity Diagram proses penerimaan DPA



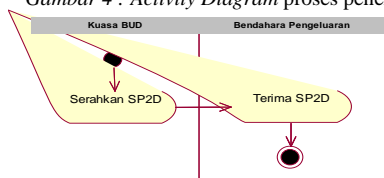
Gambar 2: Activity Diagram proses penerimaan SPD



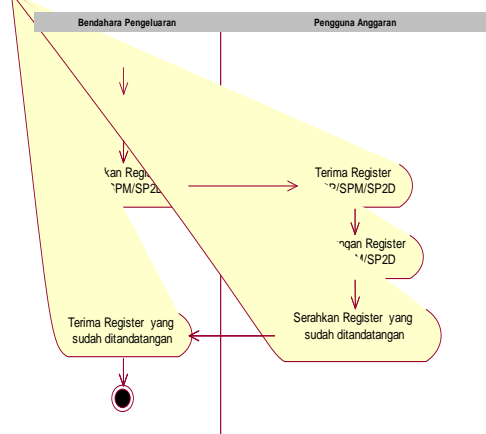
Gambar 3 : Activity Diagram proses pengajuan SPP



Gambar 4 : Activity Diagram proses penerbitan SPM



Gambar 5 : Activity Diagram proses penerimaan SP2D



Gambar 6 : Activity Diagram proses pelaporan

4.5.2 Analisa Masukan

Dalam proses pencairan uang persediaan pada bendahara pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa analisa masukan berikut deskripsinya yaitu :

- a) DPA
- b) SPD
- c) SP2D

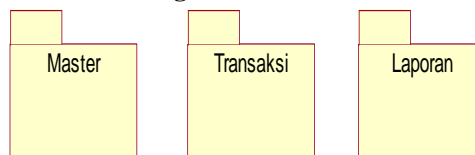
4.5.3 Analisa Keluaran

Dalam proses penatausahaan dan pertanggungjawaban uang persediaan pada bendahara pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

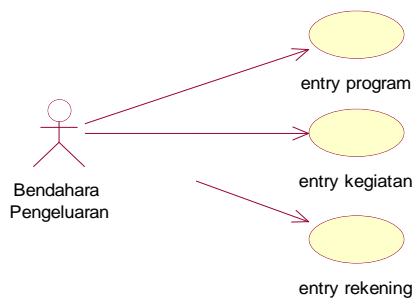
terdapat beberapa analisa keluaran berikut deskripsinya yaitu :

- a) SPP
- b) SPM
- c) Register

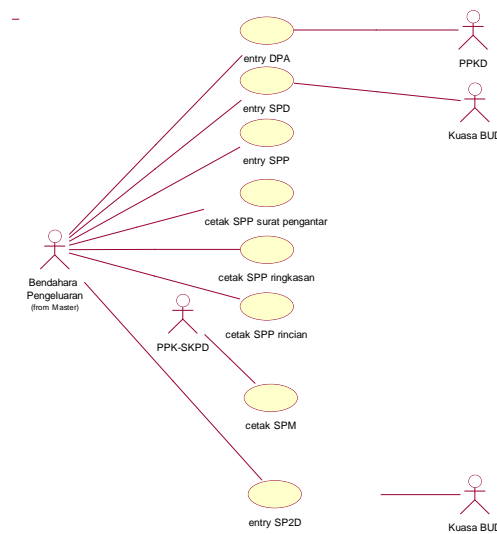
4.5.4 Use Case Diagram



Gambar 7 : Package Diagram



Gambar 8 : Use Case Master

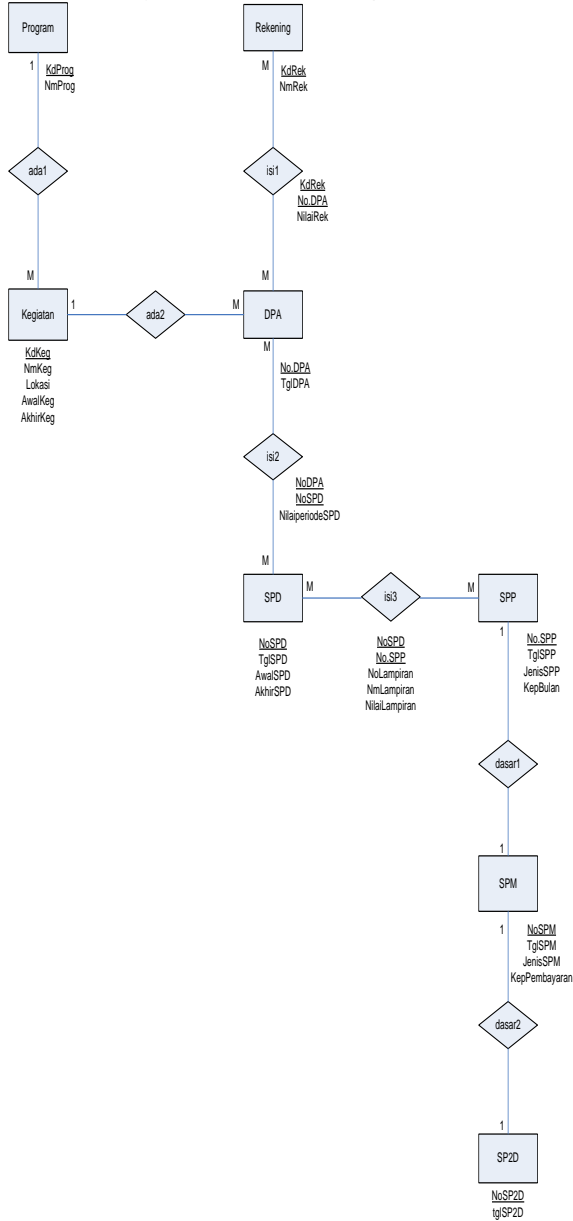


Gambar 9 : Use case Transaksi



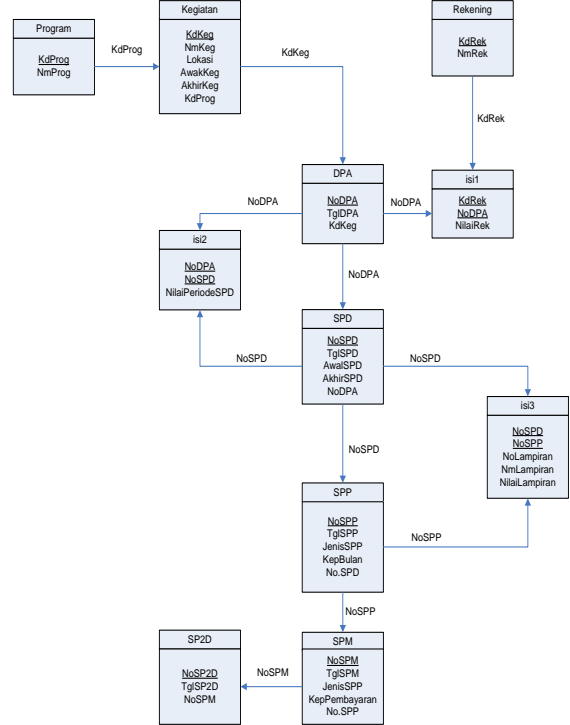
Gambar 10 : Use Case Laporan

4.5.5 Entity Relationship Diagram (ERD)



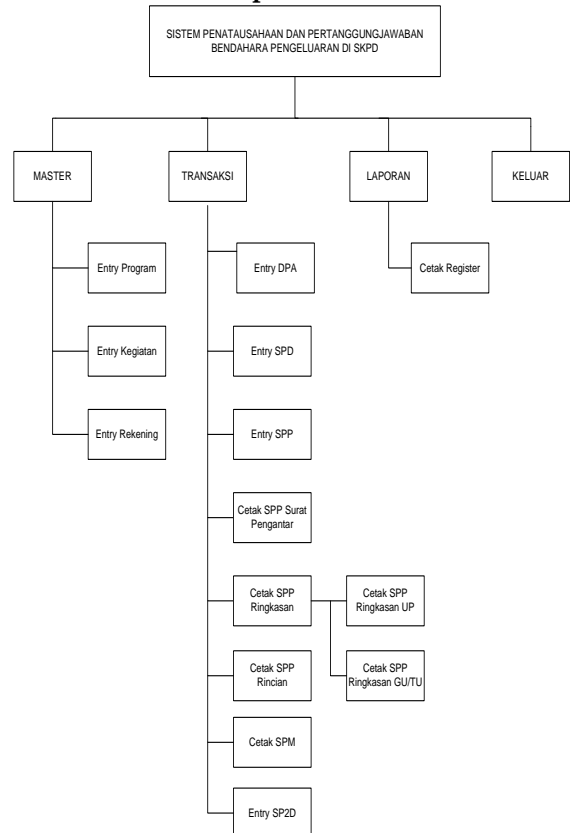
Gambar 11 : ERD

4.5.6 Logical Record Structure (LRS)



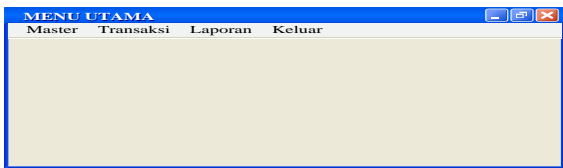
Gambar 12 : LRS

4.5.7 Struktur Tampilan



Gambar 13 : Struktur Tampilan

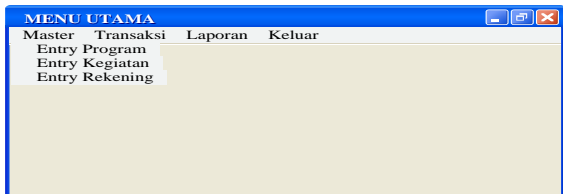
4.5.8 Rancangan Layar



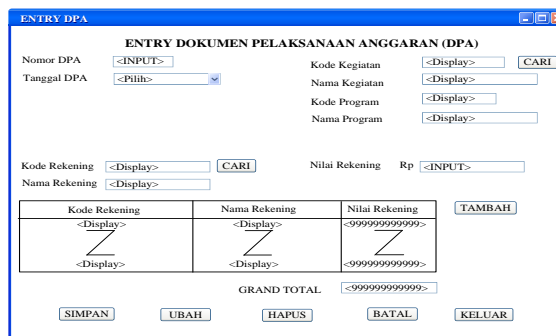
Gambar 14 : Rancangan Layar Menu Utama



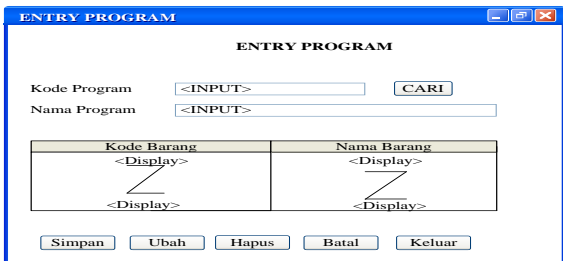
Gambar 19 : Rancangan Layar Menu Transaksi



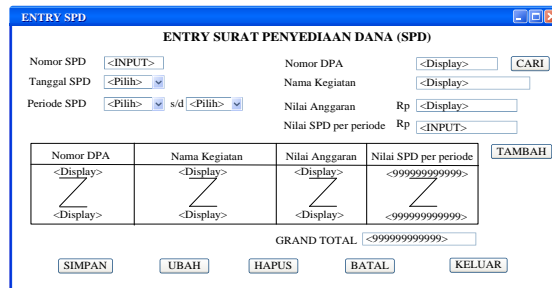
Gambar 15 : Rancangan Layar Master



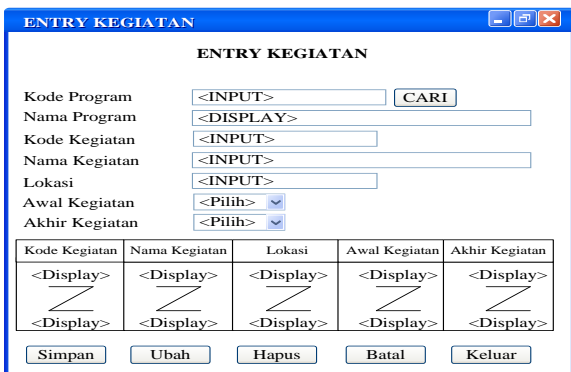
Gambar 20 : Rancangan Layar Entry DPA



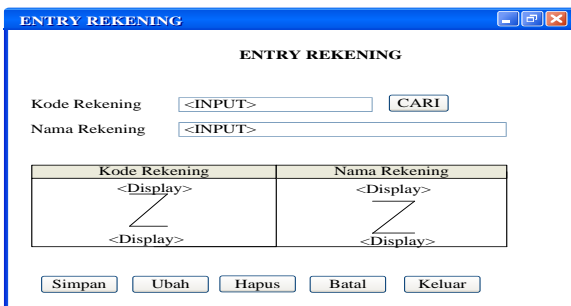
Gambar 16 : Rancangan Layar Entry Program



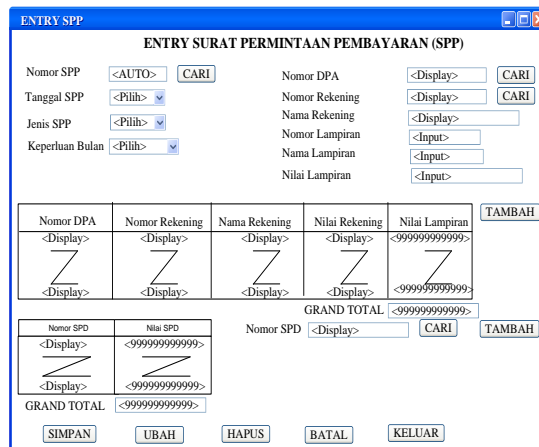
Gambar 21 : Rancangan Layar Entry SPD



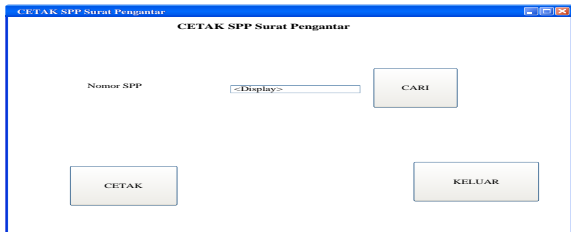
Gambar 17 : Rancangan Layar Entry Kegiatan



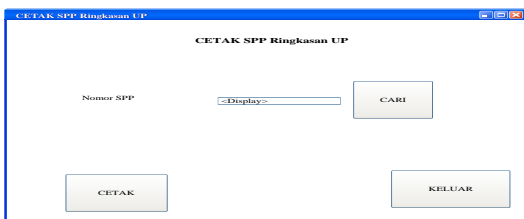
Gambar 18 : Rancangan Layar Entry Rekening



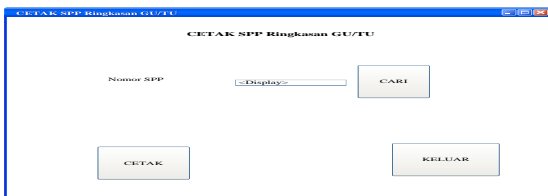
Gambar 22 : Rancangan Layar Entry SPP



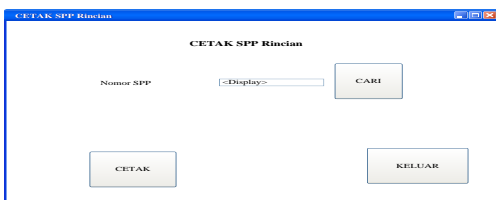
Gambar 23 : Rancangan Layar Cetak SPP Pengantar



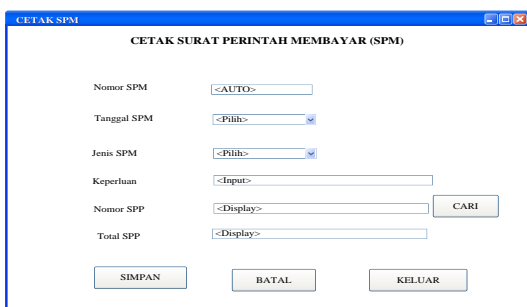
Gambar 24 : Rancangan Layar Cetak SPP Ringkasan UP



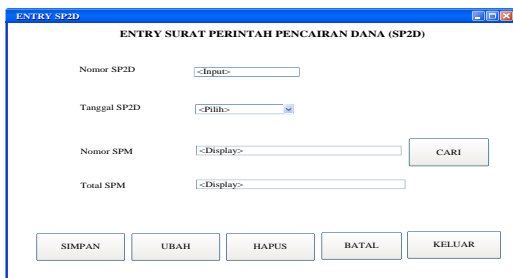
Gambar 25 : Rancangan Layar Cetak SPP Ringkasan GU/TU



Gambar 26 : Rancangan Layar Cetak SPP Rincian



Gambar 27 : Rancangan Layar Cetak SPM



Gambar 28 : Rancangan Entry SP2D

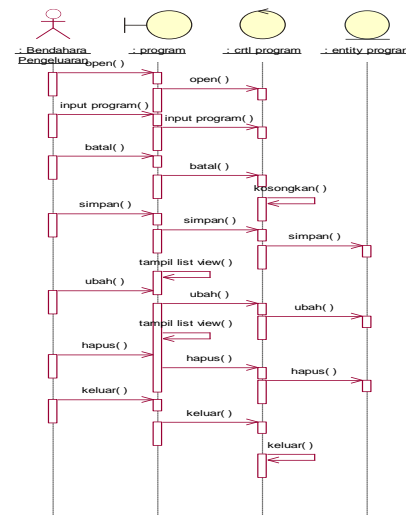


Gambar 29 : Rancangan Layar Laporan

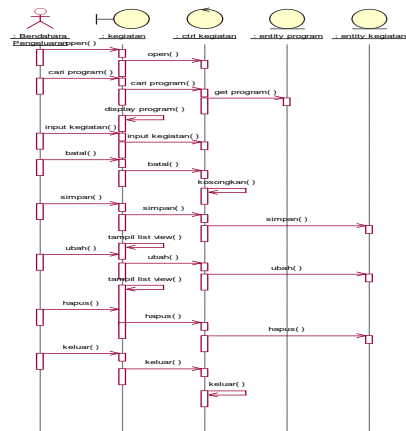


Gambar 30 : Rancangan Layar Cetak Register

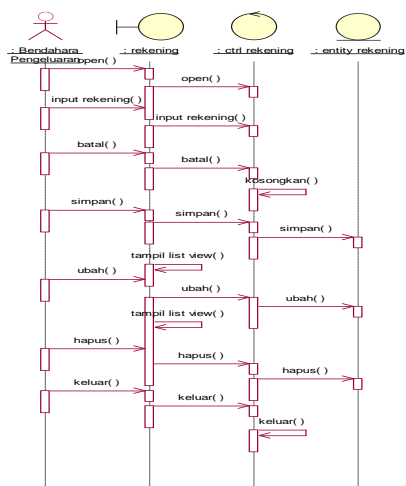
4.5.9 Sequence Diagram



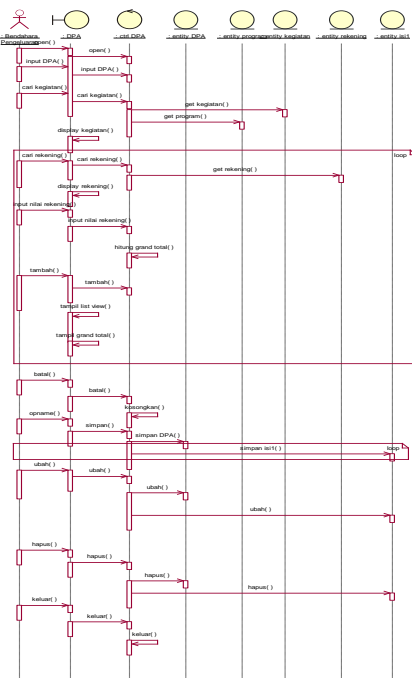
Gambar 31 : Sequence Diagram Entry Program



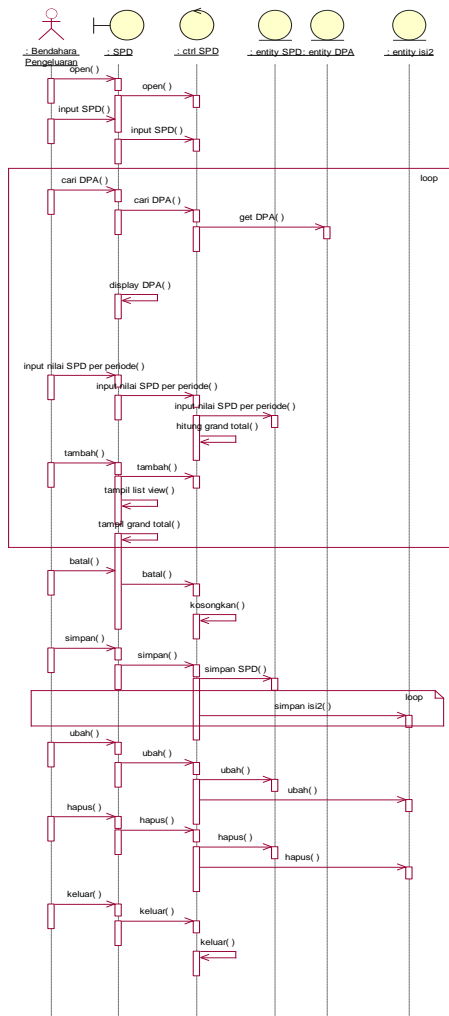
Gambar 32 : Sequence Diagram Entry Kegiatan



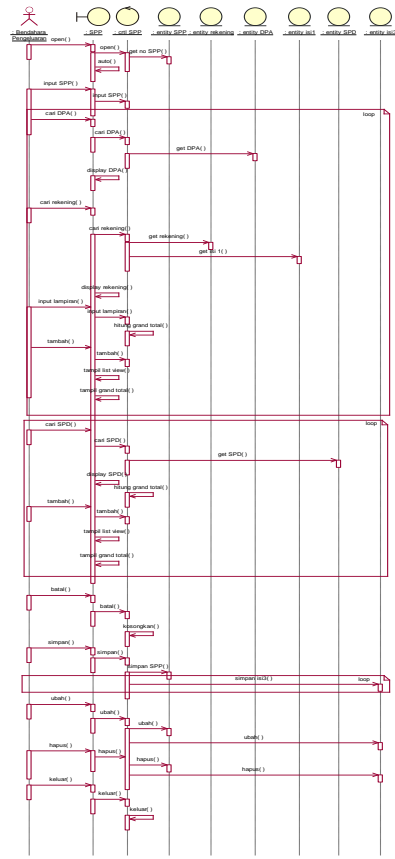
Gambar 33 : Sequence Diagram Entry Rekening



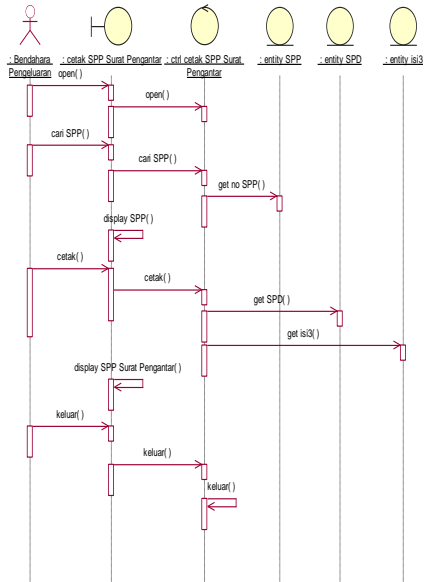
Gambar 34 : Sequence Diagram Entry DPA



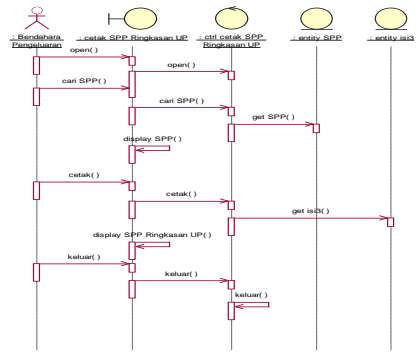
Gambar 35 : Sequence Diagram Entry SPD



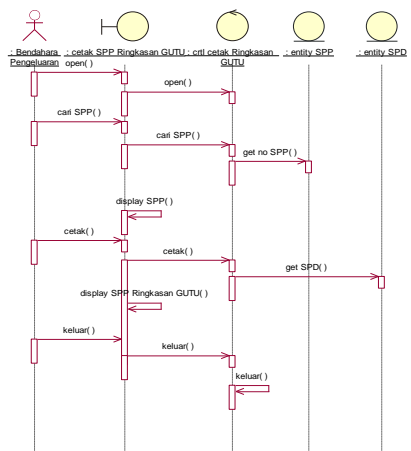
Gambar 36 : Sequence Diagram Entry SPP



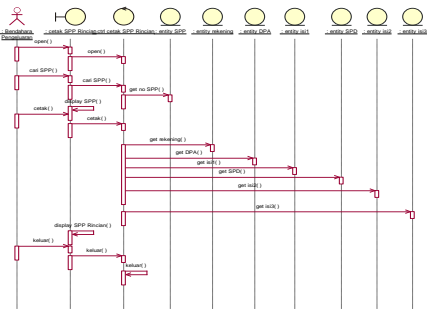
Gambar 37 : Sequence Diagram Cetak SPP Surat Pengantar



Gambar 38 : Sequence Diagram Cetak SPP Ringkasan UP

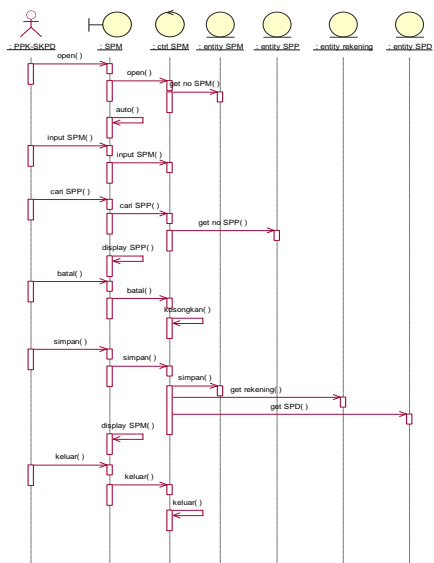


Gambar 39 : Sequence Diagram Cetak SPP Ringkasan GU/TU

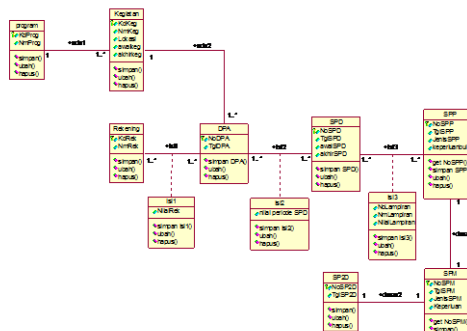


Gambar 40 : Sequence Diagram Cetak SPP Rincian

3.2.4 Rancangan Class Diagram (Entity Class)



Gambar 41 : Sequence Diagram Cetak SPM



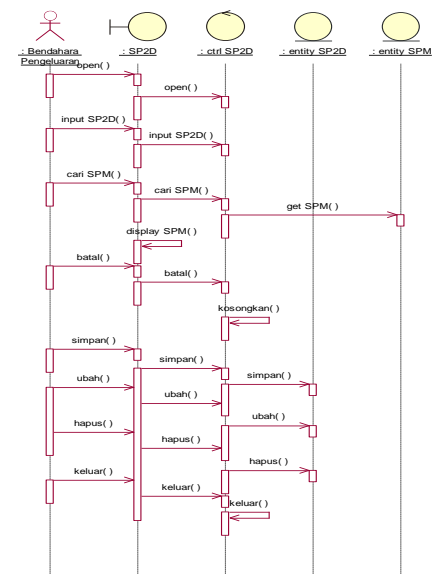
5. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan riset pada DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan mempelajari permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dengan adanya sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara komputerisasi, maka pengolahan data, penyajian informasi akan lebih cepat, serta keamanan data akan lebih terjamin karena tempat atau media penyimpanan lebih terjaga.

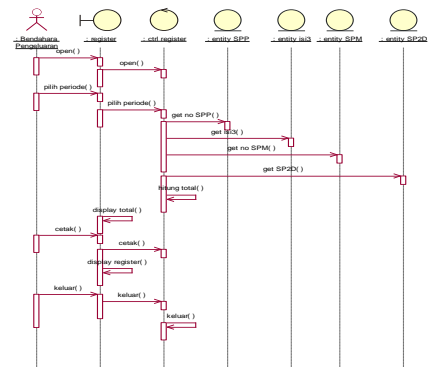
Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan penulis sebagai saran atau masukan yang diharapkan penggunaan teknologi komputerisasi lebih diterapkan dan ditingkatkan, agar bermanfaat dalam pengolahan data sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fathansyah, Basis Data, Informatika, Bandung, 2003.
- [2] Jogiyanto, Sistem Teknologi Informasi, Andi, Yogyakarta, 2003.
- [3] Kristanto, Andi, Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Graha Media, Yogyakarta, 2003.
- [4] Sutopo, Hadi, Analisa dan Desain Berorientasi Obyek, J&J Leraning, Yogyakarta, 2002.



Gambar 42 : Sequence Diagram Entry SP2D



Gambar 43 : Sequence Diagram Cetak Register